



Pengaruh *Political Internet User* Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Beny Dwi Lukitoaji^{a,1*}, Faiz Noormiyanto^{b,2}

^{a,b} Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

¹beny@upy.ac.id, ²faiz@upy.ac.id

*korespondensi penulis

Information

Kata kunci:

Political internet user
Partisipasi politik
Disabilitas rungu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *political internet user* terhadap partisipasi politik disabilitas rungu di Provinsi Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey. Penelitian dilaksanakan di Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu (GERKATIN) di Yogyakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data angket (kuesioner). Teknik analisis data meliputi skoring hasil penelitian, pentabulasian data penelitian, pengujian normalitas data, pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil skor *political internet user* dapat disimpulkan bahwa *political internet user* dapat dikategorikan tinggi dengan hasil rata-rata skor 73,4, dan perolehan skor sedang sebanyak 27 dengan prosentase 44%, sedangkan memperoleh skor tinggi sebanyak 15 orang prosentase 24% orang dan sangat tinggi sebanyak 8 orang dengan prosentase 13%. Hasil skor partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan tinggi dengan hasil rata-rata skor 70,56, dan perolehan skor sedang sebanyak 26 orang dengan prosentase 42,9%, memperoleh skor tinggi sebanyak 28 orang dengan prosentase 45,9% dan sangat tinggi sebanyak 5 orang dengan prosentase 8,1%. Bentuk partisipasi politik disabilitas rungu terwujud dalam kegiatan pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan antar warga negara, *lobbying*, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan, pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik.

ABSTRACT

The Influence of Political Internet Users on the Political Participation of Deaf Disabilities in the Special Province of Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the effect of political internet users on the participation of deaf political disabilities in the Province of Yogyakarta. This research method uses a quantitative approach to the type of survey research. The research was carried out in the Movement for the Deaf Welfare (GERKATIN) in Yogyakarta. Sampling in this study using cluster sampling techniques. This study uses a questionnaire data collection technique (questionnaire). Data analysis techniques include scoring research results, tabulating the research data, testing data normality, testing hypotheses. The results of this study indicate that the results of political internet user scores can be concluded that political internet users can be categorized as moderate with an average score of 73.4, and the acquisition of moderate scores of 27 with a percentage of 44%, while obtaining a high score of 15 people percentage of 24 % of people and very high as many as 8 people with a percentage of 13%. The political participation score results can be concluded that political participation can be categorized as moderate with an average score of 70.56, and the acquisition of a moderate score of 26 people with a percentage

Keywords:

political internet user
political participation
deaf disabilities

of 42.9%, obtaining a high score of 28 people with a percentage of 45.9% and very high as many as 5 people with a percentage of 8.1%. The form of deaf political participation is manifested in general election activities, attending general meetings, holding relations between citizens, lobbying, proposing a general policy, proposing alternative public policies that are different from the policies made by the government, submitting criticisms and making improvements to rectify the policy, pay taxes and elect government leaders, voting, political discussion activities, campaign activities, forming and joining other interest groups, and individual communication with political officials..

Copyright © 2020 (Beny Dwi Lukitoaji & Faiz Noormiyanto). All Right Reserved

How to Cite: Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. (2020). Pengaruh *Political Internet User* Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 10-19.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kelompok difabel atau disabilitas merupakan suatu kelompok yang marginal dan minoritas serta biasanya sangat rentan, jika mereka dibiarkan tanpa diberikan suatu perhatian, maka mereka bisa dikatakan mati dengan sendirinya. Persoalan terkait dengan difabel akan semakin kompleks dan rumit ketika struktur politik di negara kita mengabaikannya, sehingga kemudian melahirkan mentalitas-mentalitas inferior dikalangan difabel. Inilah kendala mendasar dari kelompok difabel, dimana mereka sendiri pada konteks politik juga tidak mau memilih pemimpin yang difabel (Gustomy, 2017). Pendapat lain mengatakan "*The deaf pathology perspective focuses om failure of the hearing mechanism. Deafnees is defined as a medical condition that requires some kind of remediation, either thought correction or compensation*" (Munoz-Baell & Ruiz, 2000) yang dapat didefinisikan sebuah kompensasi merupakan kebutuhan disabilitas rungu dalam berkomunikasi dengan masyarakat umum.

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan seringkali menyebabkan disabilitas rungu menafsirkan sesuatu hanya sebatas pemahamannya dan ini sering menjadi masalah pada dirinya. Disabilitas rungu bila ditegur oleh orang dengar yang tidak dikenalnya dengan menggunakan Bahasa lisan akan tampak sulit untuk menangkap ucapan orang tersebut dan cenderung tidak dapat memahami apa yang diucapkan Karena penggunaan Bahasa yang berbeda. Melihat dari terhambatnya komunikasi lisan disabilitas rungu cenderung mengandalkan kemampuan visualnya dalam memperoleh informasi ataupun untuk berkomunikasi dengan orang lain (Munoz-Baell & Ruiz, 2000).

Disabilitas rungu sangat mengandalkan kemampuan menangkap informasi melalui visual terutama pada era revolusi industri 4.0 yang telah menggeliat ke berbagai kalangan bahkan sampai merambah ke dunia politik, melek politik merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang sudah mengglobal, dalam memperoleh informasi tentang politik disabilitas rungu juga mengandalkan informasi visual yang praktis dan efisien yaitu dengan menggunakan smartphone untuk mengakses berita online maupun sosial media. Yang menjadi evaluasi untuk pemerintah adalah bagaimana strategi untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat secara umum, dan secara khusus kepada warga masyarakat disabilitas. Dapat diketahui dalam Pemilu tahun 2014, sebesar 87% disabilitas menggunakan hak suaranya, dan sebesar 13% tidak menggunakan suaranya (Gustomy, 2017).

Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan internet, kecerdasan buatan, robotik, dan berbagai teknologi baru lainnya. Perkembangan revolusi industri 4.0 sangat begitu cepat, akhir-akhir ini muncul banyak hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia, seperti halnya munculnya transportasi dengan sistem *ride-sharing* seperti Go-jek, Uber dan Grab, juga *room-sharing* seperti *Airbnb*. Keberadaan produk hasil revolusi industri 4.0 ini telah mengalahkan bisnis transportasi dan sewa kamar yang sudah ada sebelumnya. Namun sisi positifnya adalah membuka jenis bisnis baru, lapangan kerja baru (Ghufron, 2018).

Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pentingnya berpikir kritis dan kreativitas, *leadership* (kepemimpinan), dan *entrepreneurship* (kewirausahaan), semakin pesatnya berkembang dunia digital dan internet ke kehidupan masyarakat dalam semua bidang kehidupan, berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Inteligence*), serta muncul teknologi *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Revolusi Industri 4.0 sangat mengedepankan literasi data, teknologi dan humaniora serta pengembangan kompetensi *team work*, kolaborasi, dan *higher order thinking skill* (Prasetyo & Sutopo, 2018).

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 memiliki data survey bahwa terdapat 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, naik 51,8 persen dibandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 yang hanya 88 juta pengguna internet. Data dari APJII tahun 2016 menerangkan bahwa rata-rata mengakses internet di Indonesia menggunakan perangkat genggam. Rinciannya adalah 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan computer, 63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone, sedangkan 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer (Susanto, 2017).

Riset yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mengungkap adanya kaitan antara pengguna internet dengan pesta politik pemilihan pimpinan daerah serentak di Indonesia. Survei yang melibatkan 2.500 responden di enam pulau di Indonesia mengungkap masyarakat akan memanfaatkan internet untuk mengakses konten berisi sosial politik. APJII mengungkap ada 50,26 persen dari 143 juta pengguna internet Indonesia yang secara rutin mengakses berita sosial. Sedangkan 36,94 persen atau sekitar 52,8 juta pengguna internet rutin mengonsumsi berita politik (Susanto, 2017).

Internet digunakan untuk mengikuti perkembangan terbaru mengenai sosial politik, selain itu juga digunakan untuk mencari berita seperti di detik.com (Adiarsi et al., 2015). Senada dengan hal tersebut internet juga bermanfaat pada masa kampanye Barack Obama dikarenakan situs untuk kampanye Barack Obama mampu mengorganisasi lebih dari seratus lima puluh ribu kegiatan dan menciptakan lebih dari tiga puluh lima ribu kelompok. Akun Facebook Obama mempunyai 3.176.886 pendukung dan lewat situs MySpace Obama mendapat 987.923 orang teman. Kampanye juga menggunakan text messaging untuk berhubungan dengan pemilih muda dan mengirim email sebagai *counter attacks*. Kampanye Obama yang *high-tech*, menggunakan Internet untuk mencek fakta informasi, *counter attacks*, memperkuat koneksi kepada pendukung dan selalu siap dalam konsep 24/7 yaitu dapat dihubungi selama 24 jam setiap hari (Situmorang, 2013). Dari paparan tersebut bisa dipahami bahwa internet mempunyai peranan penting dalam kegiatan politik. Beberapa kegiatan politik yang bisa dilakukan oleh warga negara antara lain kegiatan pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan antar warga negara, *lobbying*, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan, pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik.

Penggunaan internet untuk golongan elite politik biasanya hanya untuk memenuhi kepentingan individu dan kelompok saja. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengetahui informasi lawan politiknya, melakukan dendam politiknya, membangun suatu konflik politik, mencari dukungan massa, pencitraan, mencari kekuasaan, mempertahankan kekuasaan (Susanto, 2017). Sehingga internet yang biasanya digunakan masyarakat untuk mengakses sosial media yang mereka punya memberikan dampak yang positif bagi pelaku politik. *Social media is effective tool for political campaigns. The power of social media has triggers transparancy and support e-democracy around the world. Citizens have ability to choose freely the best legislative candidate to represent them in the parliament* (Abdillah, 2014).

Melihat kondisi di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul pengaruh *Political Internet User* Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengaruh *Political Internet User* Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Yogyakarta?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah Anggota Gerakan Untuk kesejahteraan Tunarungu (GERKATIN) di Yogyakarta. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, mengenai jumlah Anggota GERKATIN dari tiga DPC yaitu DPC GERKATIN Sleman, DPC GERKATIN Bantul, DPC GERKATIN Kulon Progo. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *cluster sampling* yang dimaksudkan untuk membagi populasi pada kelompok-kelompok untuk memudahkan berdasarkan DPC dari kelompok tersebut akan diambil sampel secara acak dan proporsional. Jumlah sampel dari GERKATIN Sleman sebanyak 16, sedangkan jumlah sampel dari GERKATIN Kulon Progo sebanyak 19, dan jumlah sampel dari GERKATIN Bantul sebanyak 17. Sehingga jumlah sampel untuk penelitian ini yang diambil dari tiga DPC GERKATIN sejumlah 52 orang. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data angket (kuesioner) Tahapan-tahapan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Skoring hasil penelitian; (2) Pentabulasian Data Penelitian; (4) Pengujian Normalitas Data; (5) Pengujian Hipotesis.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa variabel dari *Political Internet User* (X) skor tertinggi 97 dan dengan skor terendah 43, dengan rata-rata sebesar 73,34 dengan standart deviasi 11,491. Harga ini berada di kategori tinggi dari klasifikasi yang sudah ditetapkan dan dapat disimpulkan bahwa hasil variabel *political internet user* berada dalam taraf intensitas yang tinggi, Variabel selanjutnya adalah variabel dependen yaitu partisipasi politik (Y) mempunyai skor tertinggi 98 dan dengan skor terendah 49 dengan skor rata-rata 72,87 maka dengan standart deviasi 12,926 yang menandakan bahwa hasil skor berada pada kategori tinggi dan dapat disimpulkan juga bahwa rata-rata partisipasi politik di Provinsi YOGYAKARTA masih dalam taraf tinggi. Melihat hasil skor *political internet user* di atas dapat disimpulkan bahwa *political internet user* dapat dikategorikan tinggi dengan hasil rata-rata skor 73,4, dan perolehan skor sedang sebanyak 27 dengan prosentase 44%, sedangkan memperoleh skor tinggi sebanyak 15 orang prosentase 24% orang dan sangat tinggi sebanyak 8 orang dengan prosentase 13%. Melihat hasil skor partisipasi politik dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan tinggi dengan hasil rata-rata skor 70,56, dan perolehan skor sedang sebanyak 26 orang dengan prosentase 42,9%, memperoleh skor tinggi sebanyak 28 orang dengan prosentase 45,9% dan sangat tinggi sebanyak 5 orang dengan prosentase 8,1%. hasil pengujian dari variabel independen yaitu dari *political internet user* (X) memiliki p-value = 0,439 nilai ini di indikasikan lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari variabel (X) yaitu *political internet user* (X) mempunyai data yang berdistribusi normal, hal ini sesuai dengan penerimaan hipotesis nol pertama yang menyatakan data berdistribusi normal apabila p-value $\geq 0,05$ dengan kata lain hipotesis yang menyatakan data berdistribusi normal adalah diterima. Sana halnya dengan variabel (Y) yaitu Partisipasi Politik (Y) yang mempunyai p-value = 0,961 jika dibandingkan dengan nilai α sebesar 5% atau 0,05 maka p-value (Y1) $0,957 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel (Y) berdistribusi normal Pengujian Hipotesis menggunakan Regresi Linier. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diajukan hipotesis pokok sebagai berikut: “ada pengaruh *political internet user* terhadap partisipasi politik”, berdasarkan hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji menggunakan teknik regresi linier.

Hasil perhitungan model analisis regresi dari variabel *political internet user* (X), terhadap partisipasi politik (Y) diperoleh persamaan regrasi sebagai berikut; $\hat{Y} = 29,315 + 0,733 X_1$. Dilihat dari hasil koefisien intersep maupun koefisien regresi yang sedang diperoleh dapat menunjukan dengan harga yang positif, hal ini bisa memberikan sebuah arti pada setiap perubahan peningkatan pada variabel (*political internet user* (X)), akan diikuti pula pada peningkatan variabel partisipasi politik (Y) secara positif. Besarnya tingkat perubahan pada rata-rata partisipasi politik (Y) diperkirakan sebesar 0,733 untuk setiap penambahan *political internet user* (X), sebesar satu satuan, atau setiap hasil skor *political internet user* bertambah 10 maka skor rata-rata partisipasi disabilitas rungu secara positif akan bertambah 7,33. untuk lebih jelasnya dapat diamati hasil output regresi dari *political internet user* (X), terhadap partisipasi politik (Y). hasil dari regresi variabel (X) terhadap (Y)

menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,537 dengan t tabel sebesar 2,390 dengan koefisien regresi 0,733 dengan tingkat signifikansi 0,000. Peneliti mengambil tingkat kepercayaan 95% yang berarti toleransi kesalahan sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan 95% model regresi yang digunakan sesuai dengan model konseptual yang akan dirancang sehingga persamaan regresi tersebut akan memiliki makna yang apabila digunakan akan membuat suatu keputusan maupun prediksi. Melihat hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa t hitung $7,537 \geq t$ tabel 2,390 dengan margin error/ tingkat signifikansi 0,000 sehingga terjadi pengaruh yang signifikan antara (X) terhadap (Y), dengan demikian hipotesis berbunyi “ada pengaruh yang signifikan antara *political internet user* (X), terhadap partisipasi politik (Y) disabilitas rungu di propinsi Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *political internet user* terhadap partisipasi politik disabilitas rungu di provinsi Yogyakarta. Kehidupan manusia era sekarang sudah sangat dekat dan akrab dengan teknologi terutama dengan gadget dan internet. Pengaruhnya sudah masuk ke semua bidang kehidupan manusia dan tentunya mempunyai dampak baik positif maupun negatif.

Pada dekade abad ini, hampir semua orang dipastikan memiliki *gadget* dan memiliki sosial media seperti *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram*, dan sebagainya. Kondisi seperti itu merupakan suatu hal yang biasa dan bisa merubah gaya komunikasi dari era konvensional ke era digital seperti sekarang ini. Pada era konvensional jika ingin berkenalan serta komunikasi maka orang bisa bertukar kartu nama, sedangkan era digital cukup bertukar akun dan sosial media masing-masing (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Sehingga manusia dalam melakukan komunikasi dalam era revolusi industri 4.0 cenderung banyak dilakukan di media sosial. Hal tersebut merupakan sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan bisa mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya.

Perubahan yang terjadi saat ini di bidang teknologi tidak hanya muncul media baru saja. Tetapi media baru tersebut berpengaruh di segala aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang komunikasi maupun interaksi yang sebelumnya tidak pernah diduga oleh manusia. Dalam hal ini kehidupan dunia seolah-olah tidak memiliki batasan atau dapat dikatakan batasannya mulai kabur (*borderless*) tidak ada kerahasiaan yang bisa ditutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial, sementara kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu tatap muka atau berada di luar jaringan (*luring*) dengan orang tersebut (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Sehingga perubahan ini memang terjadi di skala besar atau global dan berdampak ke semua negara, Batasan negara mulai kabur atau hilang dalam artian semua orang bisa mengetahui dengan mencari di internet. Tentunya dalam hal ini penggunaan internet harus sesuai dengan koridor, dan bisa membedakan informasi yang valid dan *hoaks*.

Lembaga *We Are Social* menyampaikan hasil penelitiannya bahwa pengguna internet dan sosial media tergolong cukup tinggi. Ada sekitar 15 persen pengguna internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 62 juta orang yang mempunyai media sosial *facebook*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir 3 jam dalam menggunakan media sosial di *gadget* mereka (Setiadi, 2016).

Sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bogor mengenai pemanfaatan aplikasi sosial media di kalangan pelajar menunjukkan data penggunaan *facebook* dengan jumlah sebesar 85,3%, *whatsapp* dengan jumlah sebesar 72,7%, *Instagram* dengan jumlah sebesar 71,3%, *Path* dengan jumlah sebesar 14,7%, *Line* dengan jumlah sebesar 18,7%, dan sisanya *Youtube*, *Pinterest*, *Ask fm*, *Telegram*, *Line*, *Kakaotalk* masing-masing hanya sebesar 0,07%. Data hasil penelitian tersebut menandakan bahwa penggunaan sosial media di kalangan pelajar sudah menjadi hal yang biasa (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kabupaten Bogor dapat diketahui penggunaan sosial media urutan pertama yaitu *facebook*, kedua yaitu *whatsapp*, dan ketiga *Instagram*. Maka dari itu dalam penggunaan sosial media tersebut perlu yang namanya sikap bijak.

Pemanfaatan aplikasi media sosial, yaitu dilihat dari frekuensi mengakses aplikasi media sosial dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor yaitu ditunjukkan dengan angka 34,7 % yang paling sering diakses adalah *WhatsApp*, 28 %, dan *Facebook* urutan kedua, dan 5% adalah *BBM*, *Line* dan lainnya Hal ini bermakna pada umumnya pemilih pemula dikalangan pelajar sering memanfaatkan aplikasi di dalam berkomunikasi atau mencari informasi adalah pertama melalui *WhatsApp*, kedua *Instagram* dan *Facebook*, dan ketiga *BBM*, *Line* (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Content yang ada di dalam sosial media tentunya sangat beragam dan mudah untuk diakses melalui *gadget* masing-masing, salah satu *content* yang dapat diakses yaitu tentang politik dan perkembangan isu-isu mutakhir di Indonesia bahkan di luar negeri. Politik sekarang sudah masuk dirahan digital, termasuk ajang pemilu bagaimana seseorang atau kelompok untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, dan yang lebih penting untuk mendapatkan hati rakyat. Pemanfaatan media sosial untuk politik dinilai sangat positif karena jangkauan sangat meluas, biaya lebih murah, dan banyak kalangan masyarakat yang menggunakan sosial media. Hasil penelitian mengenai pemilihan pemula di Kabupaten Bogor terkait dengan pentingnya sosial media dalam memaksimalkan pendidikan politik untuk masyarakat. Merujuk hasil penelitian, menunjuk angka 96,3% menyatakan penting media sosial sebagai medium pendidikan politik di kalangan pemilihan pemula, dan 3% menyatakan sangat penting, serta hanya 1% menyatakan tidak penting. Hal ini jelas bahwa mayoritas pemilihan pemula dikalangan pelajar di Kabupaten Bogor menganggap penting media sosial sebagai medium pendidikan politik (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Sehingga peran media sosial era digital seperti sekarang ini mempunyai peran yang penting untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara khususnya warga negara muda. Pendidikan politik diperlukan agar menjadikan warga negara sadar dan melek akan politik sehingga akan terjadi partisipasi politik yang aktif. Untuk menjadi warga negara yang melek politik sangat penting agar dapat menyingkap setiap persoalan politik yang dihadapi, sehingga tidak hanya menjadi warga negara yang tahu namun juga mau dan mampu (Azis Wahab & Sapriya, 2011), untuk menjadi warga negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menjadi relevan untuk dirumuskan dalam rangka mengurai persoalan tersebut dan persoalan politik warga negara menjadi tugas bersama antara tokoh, pemangku kebijakan, para cendekia dan lembaga pendidikan (Lazzavietamsi, 2019).

Di negara Indonesia jumlah penyandang disabilitas berjumlah 12, 5% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah 12, 5% tersebut bisa dikatakan dapat mempengaruhi stabilitas penyelenggaraan negara (Diponegoro et al., 2018). Sedangkan di Yogyakarta jumlah disabilitas adalah 494 orang (Febriantanto et al., 2019). Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi politik. Termasuk warga negara yang menyandang disabilitas, dalam penelitian ini difokuskan pada disabilitas rungu. Pada akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat dan hasil dari teknologi tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh disabilitas rungu. Teknologi yang tercipta dan sesuai dengan karakteristik disabilitas rungu akan membantu mobilitas mereka. Alat bantu atau teknologi untuk disabilitas disebut dengan teknologi asistif (*Assistive Technology*). Teknologi asistif adalah teknologi atau segala macam alat benda yang dimodifikasi atau langsung digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan mobilitas disabilitas. Sebagai contoh teknologi yang dapat digunakan disabilitas rungu adalah SIDoBi merupakan aplikasi untuk disabilitas rungu dimana sistem kerjanya adalah mentranskrip suara dari video menjadi tulisan pada layar. Selain itu disabilitas rungu juga bisa memanfaatkan google translate yang telah tersedia di laptop yang dikoneksikan dengan mic dengan jaringan Bluetooth, sehingga produk suara dapat diubah menjadi teks pada layar monitor (Widyastono et al., 2020). Teknologi yang telah disebutkan tentunya dapat membantu disabilitas rungu dalam mobilitas termasuk mengakses internet untuk mencari informasi yang mereka perlukan.

Media sosial adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi berbasis internet yang mendukung interaksi sosial, sehingga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang timbal balik. Dalam perkembangannya, media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara para politisi dengan konstituennya, yaitu antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat massif. Oleh karena itu, melalui media sosial, komunikator dapat melakukan komunikasi politik dengan para pendukung atau konstituennya, yaitu untuk membangun atau membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media sosial juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Data hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa kajian di atas bahwa *Political Internet User (X)* skor tertinggi 97 dan dengan skor terendah 43, dengan rata-rata sebesar 73,34 dengan standart deviasi 11,491. Harga ini berada di kategori tinggi dari klasifikasi yang sudah

ditetapkan dan dapat disimpulkan bahwa hasil variabel *political internet user* berada dalam taraf intensitas yang tinggi.

Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Surbakti menjelaskan bahwa partisipasi politik ialah segala keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1999: 140). Menurut Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2008 : 367) (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat (Haboddin dan Hakim, 2013: 4-5).

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih Kepala Negara (Maran, 2001: 148). Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (Maran, 2001: 148) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu: (a) menduduki jabatan politik atau administrasi; (b) mencari jabatan politik atau administrasi; (c) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (d) menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (e) menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik; (f) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik; (g) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb; (h) partisipasi dalam diskusi politik internal; dan (i) partisipasi dalam pemungutan suara (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Semua warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam ikut serta partisipasi politik, termasuk warga negara peyandang disabilitas. Dalam suatu kajian penelitian menyebutkan bahwa mayoritas disabilitas menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014, karena menganggap bahwa pemilu merupakan aktivitas penting yang dapat mengakomodasi kepentingan difabel. Namun mereka tidak percaya dengan politisi, karena menganggap tidak terwakili secara politik dalam mengakomodir kepentingan difabel. Jadi, partisipasi politik penyandang disabilitas cukup aktif dalam pemilu, akan tetapi ada ketidakpercayaan terhadap wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan difabel (Gustomy, 2017).

Beberapa dukungan pemerintah untuk menjamin partisipasi politik disabilitas bisa terwujud dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU no 8 tahun 2016, UUD 1945 pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2, UU no 4 tahun 1997 pasal 1 ayat 4 dan pasal 5, UU no 42 tahun 2008 pasal 119 ayat 1, 2, 3. Selain peraturan perundang-undangan, pihak KPU menyediakan anggaran untuk sosialisasi dan simulasi pemungutan suara bagi disabilitas, dan juga membeli alat bantu. KPU juga memberikan kode khusus di DPT dan aplikasi data pemilih. Selain itu juga terdapat penyediaan informasi dengan bahasa isyarat dan menyediakan TPS yang aksesibel. Untuk pemenuhan hak politik disabilitas maka KPU bekerjasama dengan dinas sosial kabupaten setempat, dan diperlukan juga pendamping untuk disabilitas. (Ilmiah et al., 2019) (Diponegoro et al., 2018).

Dengan melihat argumen di atas maka dapat dipastikan pemerintah melalui KPU telah menjamin hak politik bagi disabilitas untuk mengikuti partisipasi politik. Dalam penelitian ini aktivitas yang dilakukan oleh disabilitas terutama rungu antara lain terwujud dalam kegiatan pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan antar warga negara, *lobbying*, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif

kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan, pemberian suara, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik. Peran disabilitas termasuk rungu dalam partisipasi politik dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu individu dan organisasi. Secara individu mereka memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam politik praktis, dan bersedia memberikan pendidikan pentingnya partisipasi politik kepada disabilitas lainnya. Sedangkan secara organisasi juga memiliki peranan yang penting untuk memberikan informasi kepada disabilitas yang ada di daerah setempat, organisasi juga sebagai media antara pemerintah dan disabilitas, organisasi juga secara tidak langsung menjadi evaluator dan auditor terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang disabilitas (Di & Jember, 2019).

Bentuk partisipasi politik lain yang diharapkan mampu mengubah kebijakan-kebijakan publik untuk lebih berpihak bagi penyandang disabilitas adalah dengan lobby atau pembangun jaringan untuk mempengaruhi kebijakan. Dalam pengetahuannya, mayoritas responden mengatakan setuju dengan hal tersebut, dan menganggap bahwa LSM merupakan mitra jaringan yang baik bagi para penyandang disabilitas. Salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah pemaksaan, seperti demonstrasi. Responden menolak penggunaan cara ini meskipun mereka sepakat dengan demonstrasi. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka belum pernah melakukan demonstrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada dorongan yang kuat dan terkonsolidasi untuk membuat mereka melakukan demonstrasi (Gustomy, 2017). Pendapat di atas sejalan dengan hasil penelitian, bahwa disabilitas rungu mempunyai partisipasi politik yang dapat dikategorikan tinggi dengan dibuktikan perolehan rata-rata skor 70,56, dan perolehan skor sedang sebanyak 26 orang dengan prosentase 42,9%, memperoleh skor tinggi sebanyak 28 orang dengan prosentase 45,9% dan sangat tinggi sebanyak 5 orang dengan prosentase 8,1%.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah hasil skor *political internet user* dikategorikan tinggi. Sedangkan hasil skor partisipasi politik dikategorikan tinggi. Variabel *political internet user* (X) terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel partisipasi politik (Y) disabilitas rungu di provinsi Yogyakarta. Penggunaan internet dalam kehidupan manusia sangat berkembang pesat, termasuk mencari berita dengan sangat cepat dalam satu waktu. Hal ini menjadikan internet sebagai media dalam melakukan politik termasuk kampanye yang dilakukan oleh elite politik. Sebagai warga negara Indonesia dijamin hak dalam berpartisipasi politik oleh peraturan perundang-undangan termasuk warga negara Indonesia penyandang disabilitas. Karena dengan adanya penjaminan tersebut maka bisa dikatakan dan sejalan dengan hasil penelitian bahwa partisipasi politik disabilitas rungu di Yogyakarta pada kategori tinggi. Dalam partisipasi politik dapat dikatakan pemerintah sangat mendukung bagi disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya, dengan beberapa bantuan ketika di TPS berupa menyediakan informasi dengan bahasa isyarat dan tempat yang aksesibilitas. Hal inilah yang patut kita apresiasi karena sudah sewajarnya tidak ada perilaku deskriminasi lagi bagi penyandang disabilitas di Indonesia di berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang politik.

Referensi

- Abdillah, L. A. (2014). *SOCIAL MEDIA AS POLITICAL PARTY CAMPAIGN IN INDONESIA*. 12, 1–10.
- Adiarsi, G. R., Stellarosa, Y., & Silaban, M. W. (2015). *LITERASI MEDIA INTERNET DI KALANGAN MAHASISWA*. 6(4), 470–482.
- Di, D., & Jember, K. (2019). *No Title*. 2.
- Diponegoro, U., Prof, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2018). *No Title*.
- Febriantanto, P., Disabilitas, P., & Yogyakarta, K. (2019). *Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. 1(1), 157–190.
- Ghufro, M. A. (2018). Revolusi industri 4.0: Tantangan, Peluang dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan.

Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Gustomy, R. (2017). PARTISIPASI POLITIK DIFABEL DI 2 KOTA. *IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies*. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.01.8>
- Ilmiah, J., Fisip, M., Volume, U., Implementasi, F., Politik, H. A. K., Penyandang, B., Di, D., Banda, K., & Menjelang, A. (2019). *DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH MENJELANG*. 1–19.
- Lazzavietamsi, F. A. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.21067/jmk.v3i2.2910>
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>
- Munoz-Baell, I. M., & Ruiz, M. T. (2000). Empowering the deaf. Let the deaf be deaf. *Journal of Epidemiology and Community Health*. <https://doi.org/10.1136/jech.54.1.40>
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). INDUSTRI 4.0: TELAAH KLASIFIKASI ASPEK DAN ARAH PERKEMBANGAN RISET. *J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri*. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DIKALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN BOGOR. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965>
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Jurnal Humaniora*.
- Situmorang, J. R. (2013). *Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik , Bisnis , Pendidikan Dan Sosial Budaya*. 8(1), 77–91.
- Susanto, E. H. (2017). MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK. *Jurnal ASPIKOM*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Widyastono, H., Luar, P., Universitas, B., & Maret, S. (2020). *Analisis Perbandingan Teknologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Negara Indonesia dan Negara-Negara Eropa (Finlandia, Jerman, Inggris, Belanda) (1)*. 3(1), 32–38.
- Haboddin, Muhtar dan Lukman Hakim. (2013). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013), Malang: Universitas Brawijaya.